



## **STRATEGI ADAPTIF DALAM VALIDASI DATA KEMISKINAN: MENGATASI KENDALA INFRASTRUKTUR DIGITAL MELALUI PENDEKATAN DOOR-TO-DOOR**

Dddy Zakarias Armando Ballu<sup>1\*</sup>, Mohammad Rezza Fahlevvi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: [dddyballu11@gmail.com](mailto:dddyballu11@gmail.com), [rezza@ipdn.ac.id](mailto:rezza@ipdn.ac.id)

Received: (14-12-2025), Accepted: (28-12-2025), Published Online: (31-12-2025)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi verifikasi data kemiskinan di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, melalui aplikasi BANGKIT yang sering mengalami kendala teknis berupa pemeliharaan sistem pada jam kerja. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan partisipatif yang didukung oleh data deskriptif kuantitatif sederhana, penelitian ini menerapkan strategi validasi hibrida yang mengintegrasikan pencatatan formulir manual secara doortodoor sebagai mekanisme mitigasi saat infrastruktur digital tidak stabil. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi visual terhadap indikator fisik hunian dan aset ekonomi pada 2.127 Kepala Keluarga (KK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi verifikasi faktual berhasil mengoreksi basis data awal, di mana jumlah keluarga miskin valid menurun menjadi 2.048 KK. Temuan signifikan mencatat adanya inclusion error sebanyak 468 KK yang secara faktual tidak miskin namun terdaftar sebagai penerima bantuan, akibat adanya manipulasi data mandiri dan budaya ketergantungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di tengah keterbatasan infrastruktur teknologi pemerintahan daerah, intervensi verifikasi fisik tetap menjadi instrumen vital untuk menjamin akurasi data. Strategi input ulang data manual ke sistem digital terbukti efektif menjaga integritas basis data kemiskinan, sehingga disarankan adanya penjadwalan ulang pemeliharaan sistem di luar jam operasional.

**Kata kunci:** Aplikasi BANGKIT, Validasi Data Kemiskinan, Strategi Adaptif, Verifikasi Faktual

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the optimization strategy for poverty data verification in Talaga District, Majalengka Regency, through the BANGKIT application, which frequently experiences technical issues in the form of system maintenance during business hours. Using a qualitative descriptive method with a participatory field study approach supported by simple quantitative descriptive data, this study implemented a hybrid validation strategy strategy that integrates manual doortodoor form recording as a mitigation mechanism when digital infrastructure is unstable. Data collection was conducted through visual observation of physical indicators of housing and economic assets in*

*2,127 households (KK). The results showed that the factual verification strategy successfully corrected the initial database, where the number of valid low-income families decreased to 2,048 KK. A significant finding noted the inclusion error of 468 KKs who were not factually poor but were registered as aid recipients, due to independent data manipulation and a culture of community dependency. This study concluded that, amidst the limitations of local government technology infrastructure, physical verification intervention remains a vital instrument to ensure data accuracy. The strategy of manually reentering data into the digital system proved effective in maintaining the integrity of the poverty database; therefore, it is recommended to reschedule system maintenance outside of operational hours.*

**Keywords:** BANGKIT Application, Poverty Data Validation, Adaptive Strategy, Factual Verification

## PENDAHULUAN

Studi ini secara kritis mengkaji paradoks mendasar dalam implementasi *egovernment* di negara berkembang: meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara teoritis dipromosikan sebagai katalis untuk efisiensi birokrasi, transparansi, dan akurasi data (Misuraca & Viscusi, 2015; Wirtz dkk., 2019), realitas empiris justru menunjukkan bahwa adopsi teknologi tanpa didukung ekosistem institusional dan infrastruktur yang matang dapat mereproduksi atau bahkan memperparah inefisiensi yang sudah ada (Heeks, 2001). Dinamika ini tercermin nyata dalam implementasi *EGovernment* di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia yang menunjukkan spektrum pemanfaatan yang beragam. Di satu sisi, teknologi informasi berhasil dimanfaatkan secara optimal untuk fungsi promosi potensi daerah dan pariwisata, sebagaimana terjadi di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada (Mandala & Fahlevvi, 2024). Namun, di sisi lain, penerapan teknologi untuk fungsi pelayanan dasar dan jaring pengaman sosial seperti aplikasi BANGKIT di Kabupaten Majalengka masih menghadapi tantangan fundamental terkait stabilitas infrastruktur dan validitas data. Hal ini sejalan dengan temuan (Ilham dkk., 2025) di Sumatera Barat yang menyoroti bahwa efektivitas teknologi digital dalam pemerintahan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat, di mana kesenjangan akses masih menjadi hambatan utama.

Penelitian ini menyoroti manifestasi paradoks tersebut dalam konteks program pengentasan kemiskinan melalui studi kasus mendalam terhadap implementasi aplikasi BANGKIT (*Bebas Kemiskinan dan Stunting*) di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Indonesia. Temuan lapangan mengungkap bahwa proses validasi data yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan target penerima bantuan justru terbentur pada tiga lapisan masalah yang saling terkait: (1) masukan data (*garbage in*) yang bermasalah, berupa ketergantungan pada basis data lama yang tidak terverifikasi serta inkonsistensi data kependudukan (Purwanto dkk., 2021); (2) ketidakstabilan infrastruktur digital, yang ditandai dengan frekuensi pemeliharaan sistem pada jam kerja sehingga mengganggu kontinuitas layanan (*Observasi Lapangan*, 2024); dan (3) distorsi perilaku (*perverse incentives*), di mana masyarakat melakukan manipulasi data mandiri (seperti mengunggah foto rumah usang milik kerabat) untuk memenuhi syarat bantuan, sehingga menyebabkan *inclusion error* (kesalahan inklusi, yakni masuknya warga yang

tidak berhak ke dalam daftar penerima bantuan) yang signifikan. Kombinasi faktorfaktor ini menunjukkan bahwa pendekatan "*digital by default*" yang sering diadvokasi oleh lembaga pembangunan internasional (World Bank, 2022) dapat gagal mencapai tujuannya jika mengabaikan konteks sosioteknis lokal.

Merespon kegagalan sistem murni digital, pemerintah daerah menginisiasi strategi verifikasi hibrida sebagai mekanisme adaptif. Strategi ini tidak menggantikan, melainkan melengkapi sistem digital dengan prosedur verifikasi faktual secara *doortodoor* oleh tim yang terdiri dari Praja IPDN dan perangkat desa, dengan berpedoman pada indikator kemiskinan multidimensi resmi (Badan Pusat Statistik, 2022). Kerangka kerja ini sejalan dengan konsep *sociotechnical resilience* dalam literatur tata kelola digital, yang menekankan kapasitas sistem untuk beradaptasi terhadap guncangan melalui mekanisme alternatif (Janssen & van der Voort, 2016). Dalam konteks Talaga, mekanisme manual berfungsi sebagai *procedural buffer* yang menjaga keberlangsungan proses validasi saat infrastruktur digital gagal, sekaligus sebagai *reality check* terhadap data yang dimasukkan secara mandiri. Efektivitas strategi ini terbukti secara empiris: dari basis data awal 2.127 Kepala Keluarga (KK), verifikasi lapangan berhasil mengidentifikasi 468 KK (22%) sebagai "tidak miskin" namun terdaftar sebagai calon penerima bantuan (*Data Primer Lapangan, 2024*). Temuan ini bukan hanya menunjukkan tingginya *inclusion error* dimana merupakan suatu kondisi di mana individu yang tidak memenuhi syarat justru terdaftar sebagai penerima manfaat, tetapi lebih penting mengonfirmasi proposisi teoretis bahwa validasi fisik merupakan komponen kritis (*necessary complement*) dalam siklus data pemerintahan digital di lingkungan dengan infrastruktur yang rapuh dan insentif sosial yang kompleks.

Kontribusi ilmiah penelitian ini tiga lapis. *Pertama*, penelitian ini memperkaya literatur *Digital Government* dengan bukti empiris yang mendetail tentang mekanisme *bypass* atau *workaround* yang dikembangkan aktor lokal di tingkat tapak untuk mengatasi keterbatasan sistem terpusat, sebuah fenomena yang sering disebut namun jarang didokumentasikan secara kuantitatif (Egyedi & Spirco, 2011). *Kedua*, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang "Paradoks Tata Kelola Digital" dengan menunjukkan bahwa titik kritisnya terletak bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada disjungsi antara logika teknis sistem (yang mengutamakan konsistensi dan kecepatan) dengan logika sosial masyarakat (yang dinamis, kontekstual, dan sarat strategi). *Ketiga*, penelitian ini menawarkan kerangka analitis hibriditas digitalmanual sebagai model tata kelola adaptif yang lebih realistik untuk konteks negara berkembang, di mana kematangan digital dan kapasitas institusional tumbuh secara bertahap dan tidak merata. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini mengajukan hipotesis utama: tingkat akurasi data dalam program bantuan sosial berbasis digital berbanding lurus dengan tingkat integrasi mekanisme verifikasi faktual dan pemahaman terhadap dinamika sosiologis lokal, terlepas dari kecanggihan platform teknologi yang digunakan. Implikasi kebijakan yang diajukan adalah perlunya pergeseran dari

paradigma *technology driven* menuju paradigma *socio technically informed design* dalam perancangan sistem *e-government*, di mana teknologi ditempatkan sebagai alat bantu dalam proses pemerintahan yang tetap berpusat pada konteks manusia dan kelembagaan.

## METODE

Desain dan Lokasi Penelitian Penelitian ini mengadopsi desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan partisipatif (*participatory field study*) (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan partisipatif dipilih untuk memungkinkan peneliti tidak hanya mengamati fenomena dari luar, tetapi terlibat aktif sebagai verifikator dalam mekanisme birokrasi validasi data, sehingga mampu memahami kendala teknis dan dinamika sosial secara mendalam. Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, dengan durasi pelaksanaan intensif selama 21 hari, mulai tanggal 13 Juni hingga 3 Juli 2024. Fokus utama penelitian diarahkan pada evaluasi dan optimalisasi penggunaan aplikasi BANGKIT melalui intervensi langsung peneliti dalam memverifikasi anomali data administratif di tingkat desa.

Sumber Data dan Subjek Penelitian Sumber data dikategorikan menjadi dua klaster utama. Pertama, data sekunder diperoleh dari basis data awal aplikasi BANGKIT yang merupakan data warisan survei lama (Resosek) serta dokumen kependudukan legal (KK dan NIK) (Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, 2023) untuk memetakan populasi target. Kedua, data primer dikumpulkan melalui teknik sensus parsial dengan observasi langsung (*doortodoor*) dan wawancara terstruktur terhadap 2.127 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam *prelist* data verifikasi terdata (Sugiyono, 2019). Jumlah populasi ini diambil secara total (total sampling) dari data yang memerlukan pemutakhiran di wilayah studi.

Instrumen dan Definisi Operasional Untuk menjamin objektivitas pengukuran status kemiskinan, instrumen penelitian mengacu pada parameter kemiskinan multidimensi dalam aplikasi BANGKIT yang mencakup 15 indikator utama. Indikator ini dikelompokkan ke dalam tiga dimensi penilaian:

1. Dimensi Habitation (Hunian): Observasi fisik terhadap kualitas lantai, jenis dinding, kondisi atap, dan ketersediaan fasilitas sanitasi layak.
2. Dimensi Ekonomi: Estimasi pendapatan rumah tangga dan kemampuan daya beli pangan protein hewani/nabati.
3. Dimensi Aset: Inventarisasi kepemilikan aset bergerak/tidak bergerak dengan nilai jual di atas Rp1.500.000. Pedoman ini selaras dengan standar pemutakhiran data berbasis partisipatif nasional (Pemerintah Kabupaten Majalengka, 2023; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2022).

Prosedur Pengumpulan Data: Strategi Hibrida Mengingat kendala stabilitas infrastruktur digital, proses pengumpulan data menerapkan Strategi Validasi Hibrida Adaptif. Strategi ini dirancang sebagai mekanisme mitigasi ketika aplikasi BANGKIT

mengalami gangguan atau pemeliharaan (*maintenance*) pada jam kerja produktif. Protokol operasional standar yang diterapkan adalah: (1) Peneliti beralih menggunakan formulir survei manual (berbasis kertas) untuk mencatat data lapangan saat sistem *down*; (2) Formulir manual berfungsi sebagai *buffer* data sementara; (3) Data tersebut kemudian diinput ulang (*reentry*) ke dalam sistem digital segera setelah server kembali stabil untuk menjamin integritas basis data.

Analisis Data Teknik analisis data dilakukan melalui mekanisme *scoring* otomatis sistem yang mengklasifikasikan subjek ke dalam empat strata kesejahteraan: tidak miskin, rentan miskin, miskin, dan sangat miskin. Analisis lanjutan dilakukan secara komparatif (*comparative analysis*) antara basis data awal (deklaratif) dengan data hasil validasi lapangan (faktual). Fokus analisis adalah mengukur tingkat *Inclusion error* yakni proporsi penerima bantuan yang secara faktual tidak memenuhi kriteria miskin untuk menilai efektivitas intervensi verifikasi fisik dalam menghasilkan basis data yang akurat.

**Etika Penelitian** Mengingat penelitian ini menyingkap data sensitif terkait status ekonomi dan temuan manipulasi data warga, prinsip anonimitas diterapkan secara ketat. Seluruh identitas personal subjek dalam pelaporan hasil penelitian telah disamarkan untuk melindungi privasi dan mencegah stigmatisasi sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

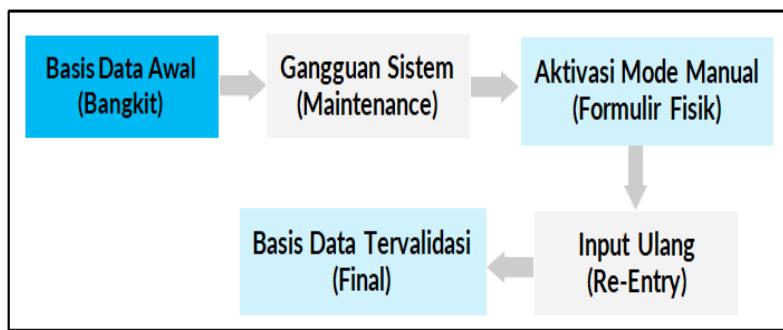
Bab ini menguraikan temuan empiris dan analisis mendalam dari studi lapangan di Kecamatan Talaga, yang disajikan secara sistematis mulai dari aspek teknis hingga dinamika sosial. Pemaparan diawali dengan identifikasi kendala infrastruktur pada aplikasi BANGKIT yang memicu penerapan strategi validasi hibrida, diikuti dengan penyajian data kuantitatif hasil koreksi verifikasi faktual di lapangan. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada interpretasi data tersebut untuk menjawab paradoks efektivitas digitalisasi dalam tata kelola kemiskinan, serta mengungkap fenomena perilaku sosial (*moral hazard*) yang memengaruhi akurasi penargetan bantuan. Struktur pembahasan ini dirancang untuk membuktikan bahwa integrasi antara sistem digital dan verifikasi manual merupakan kunci adaptasi dalam ekosistem pemerintahan daerah yang dinamis.

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Kendala Infrastruktur dan Penerapan Validasi Bertingkat

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur digital aplikasi BANGKIT belum sepenuhnya siap mendukung operasional verifikasi massal. Teridentifikasi bahwa aplikasi sering mengalami proses pemeliharaan (*maintenance*) justru pada jam kerja produktif, yang menyebabkan gangguan akses bagi verifikator (berdasarkan log catatan gangguan sistem). Sebagai respons terhadap kendala ini, ditemukan bahwa tim verifikasi menerapkan mekanisme *fallback* menggunakan instrumen manual. Proses ini dilakukan dengan pencatatan data pada formulir fisik terlebih dahulu saat aplikasi *down*, yang kemudian diinput ulang (*reentry*) ke dalam sistem digital saat server kembali stabil,

seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.



Sumber: Diolah dari observasi lapangan, 2024

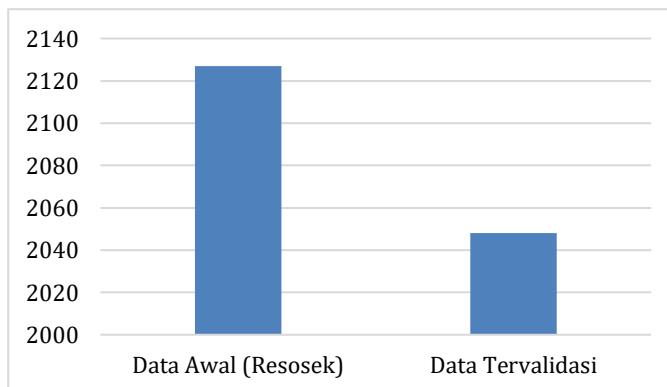
**Gambar 1. Mekanisme Strategi Validasi Hibrida untuk Mengatasi Kendala Infrastruktur**

## 2. Kuantifikasi Data Kemiskinan PascaValidasi

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan secara *doortodoor* dengan memeriksa 15 indikator kemiskinan (termasuk kondisi fisik bangunan, sanitasi, dan aset), diperoleh perubahan data yang signifikan dari basis data awal (Pemerintah Kabupaten Majalengka, 2023).

- Data Awal (Resosek): Jumlah data awal keluarga miskin tercatat sebanyak 2.127 Kepala Keluarga (KK).
- Data Tervalidasi: Setelah verifikasi, jumlah keluarga miskin yang valid menurun menjadi 2.048 KK.

Perubahan komposisi data ini divisualisasikan dalam Gambar 2 dan detail temuan anomali dijelaskan lebih lanjut.



Sumber: Data primer hasil verifikasi, 2024

**Gambar 2. Perbandingan Data Awal dan Data Tervalidasi**

Temuan Anomali Data: Dari 2.127 KK data awal, proses validasi mengungkap dua kategori anomali utama:

- Inclusion error*: Sebanyak 468 KK masuk dalam kategori inclusion error, yaitu warga yang terdata sebagai penerima bantuan namun secara faktual masuk kategori "Tidak Miskin".

2. Data Tidak Relevan: Sebanyak 79 KK datanya dihapus karena telah meninggal dunia atau pindah domisili.

Proporsi anomali data ini ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Komposisi Anomali Data dalam Basis Data Awal**

Kategori Temuan	Total	Persentase
KK Valid (Setelah Koreksi)	2048	74.8%
Inclusion error (Tidak Miskin)	468	17.1%
Data Tidak Relevan (Meninggal/Pindah)	79	2.9%
Total KK dalam Diagram	2595	94.8%

Sumber: Data primer hasil verifikasi, 2024

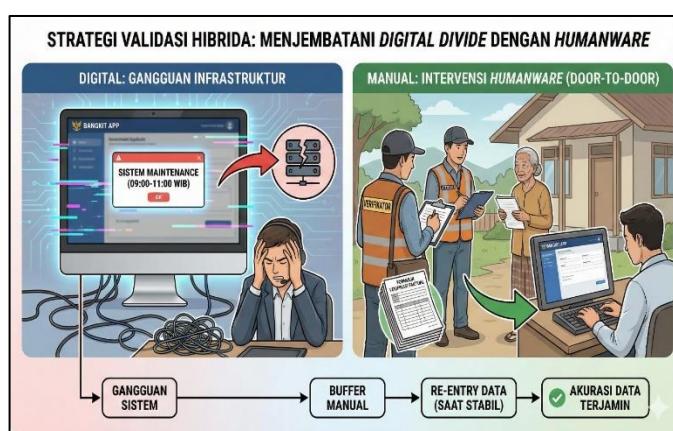
### 3. Profil Karakteristik Kemiskinan

Hasil observasi visual dan wawancara menemukan pola karakteristik spesifik pada keluarga miskin di Kecamatan Talaga:

- Pendidikan: Mayoritas kepala keluarga miskin memiliki tingkat pendidikan rendah, yakni hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau tidak sekolah. Temuan ini selaras dengan studi makro oleh (Sinurat, 2023) yang membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya aspek pendidikan, memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan; artinya, rendahnya akses pendidikan secara langsung berkontribusi pada langgengnya rantai kemiskinan.
- Bahasa: Terdapat keterbatasan penguasaan Bahasa Indonesia, di mana kepala keluarga lebih dominan dan fasih menggunakan bahasa daerah (Sunda), yang menghambat komunikasi formal.
- Kondisi Lansia: Ditemukan tingginya angka kemiskinan pada kelompok usia nonproduktif (lansia) yang sakitsakitan dan hidup menumpang pada anak mereka yang juga berpenghasilan rendah.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Efektivitas Strategi Hibrida dalam Tata Kelola Pemerintahan Digital



**Gambar 3. Strategi Hibrida dalam Tata Kelola Pemerintahan Digital**

Gambar 3 menunjukan, analisis efektivitas strategi hibrida dalam tata kelola pemerintahan digital menegaskan bahwa transformasi digital di tingkat daerah masih menghadapi tantangan struktural berupa "Digital Divide" dari sisi infrastruktur dan kapasitas operasional (Purwanto dkk., 2021; Wirtz dkk., 2019). Fenomena serupa juga ditemukan oleh (Ilham dkk., 2025) dalam konteks kepatuhan pajak daerah, yang menegaskan bahwa hambatan infrastruktur dan literasi digital menuntut adanya pendekatan tata kelola yang lebih inklusif dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem otomasi. Fakta empiris di lapangan memperkuat hal ini, di mana observasi selama 21 hari kerja mencatat bahwa sistem mengalami gangguan akses (*maintenance*) sebanyak 8 kali dengan rata-rata durasi 2 jam per kejadian pada jam puncak pelayanan produktif (09.00–11.00 WIB), sehingga menuntut penerapan strategi validasi hibrida mekanisme *fallback* manual dan *re-entry* data yang bukan dipandang sebagai kemunduran, melainkan bentuk resiliensi birokrasi untuk menjaga keberlangsungan layanan di tengah ekosistem digital yang belum matang.

Dalam konteks ini, keberhasilan verifikasi data di Kecamatan Talaga membuktikan bahwa intervensi manusia (*humanware*) melalui pendekatan *door-to-door* tetap menjadi variabel penentu akurasi data ketika *software* dan *hardware* belum memadai (Misuraca & Viscusi, 2015), hal ini selaras dengan prinsip bahwa teknologi hanyalah alat bantu (*enabler*) sementara validitas data sangat bergantung pada proses verifikasi faktual di lapangan sesuai dengan data dari (World Bank, 2021), yang sekaligus mengoreksi asumsi bahwa digitalisasi selalu linear dengan peningkatan akurasi dan justru menekankan urgensi pendekatan "*digital informed fieldwork*" di mana data lapangan menjadi landasan korektif utama bagi sistem digital.

## 2. Menyeimbangkan *Inclusion* dan *Exclusion Error*: Sebuah Keadilan Distributif

Kritik utama terhadap validasi data kemiskinan sering kali dialamatkan pada dugaan efisiensi anggaran semata, di mana verifikasi hanya difokuskan untuk mencoret penerima bantuan (*inclusion error*). Namun, penelitian ini membuktikan bahwa strategi validasi *doortodoor* bekerja secara dua arah (resiprokal). Selain mengidentifikasi 468 KK yang tidak layak menerima bantuan (*Inclusion error*), proses verifikasi faktual ini juga berhasil mengungkap fenomena *Exclusion Error*, yaitu keberadaan warga miskin yang sebelumnya luput dari pendataan digital awal (*invisible poor*).

Berdasarkan kalkulasi matematis dari perubahan basis data, jika validasi hanya bertujuan membersihkan data, jumlah penerima bantuan seharusnya merosot tajam dari 2.127 KK menjadi 1.580 KK (setelah dikurangi 468 KK tidak miskin dan 79 KK data anomali). Namun, data akhir tervalidasi menunjukkan angka 2.048 KK. Selisih angka ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi lapangan berhasil menjaring 468 Kepala Keluarga baru yang benarbenar memenuhi kriteria miskin namun sebelumnya tidak terdaftar (*Exclusion Error*).

Temuan ini menegaskan bahwa validasi manual berfungsi sebagai instrumen Keadilan Distributif (*Distributive Justice*). Sumber daya yang "diselamatkan" dari penerima yang tidak berhak (kelompok *free riders*) tidak ditarik kembali ke kas negara sebagai penghematan, melainkan direalokasikan secara langsung kepada kelompok masyarakat miskin baru yang ditemukan saat penyisiran lapangan. Dalam perspektif tata kelola, hal ini membuktikan bahwa kegagalan infrastruktur digital tidak hanya berisiko memasukkan orang yang salah, tetapi juga berisiko mengucilkan orang yang benar. Oleh karena itu, pendekatan *doortodoor* tidak bisa dipandang bias; sebaliknya, pendekatan ini memulihkan hak warga miskin yang terpinggirkan oleh sistem administrasi yang kaku, memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran sekaligus inklusif.

### 3. Fenomena Moral Hazard sebagai Strategi Bertahan Hidup Rasional

Validasi lapangan mengungkap fakta empiris yang mengejutkan terkait akurasi basis data. Tingginya angka *inclusion error* tercatat sebanyak 468 KK atau setara dengan 22,0% dari total populasi data awal. Kelompok ini secara administratif terdaftar sebagai penerima bantuan, namun verifikasi faktual mengidentifikasi mereka dalam kategori "Tidak Miskin". Besarnya persentase penyimpangan ini mengindikasikan bukan sekadar kesalahan teknis input data, melainkan adanya fenomena penyimpangan perilaku sosial yang signifikan di tingkat akar rumput.

Analisis kualitatif mendalam melalui observasi visual dan wawancara menemukan pola indikasi manipulasi data yang sistematis. Sebagian masyarakat yang secara ekonomi mampu, terbukti sengaja menggunakan strategi manipulatif, seperti menyerahkan foto kondisi rumah lama yang sudah tidak relevan atau menyembunyikan kepemilikan aset bergerak (kendaraan/ternak) saat pendataan awal. Tujuan utamanya adalah untuk memosisikan diri mereka terlihat "miskin" secara visual demi mengakses bantuan pemerintah.

Temuan ini memiliki korelasi teoretis yang kuat dengan konsep Perilaku Oportunistik atau *Moral Hazard* dalam studi ekonomi publik. Fenomena ini terjadi ketika terdapat asimetri informasi (*information asymmetry*) antara pemerintah (sebagai *principal*) dan warga (sebagai *agent*). Pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan untuk memantau kondisi ekonomi riil setiap rumah tangga secara *realtime*, sementara warga memiliki informasi penuh tentang kondisi mereka sendiri. Kesenjangan informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk memperoleh keuntungan pribadi dari program sosial dengan cara mendistorsi informasi yang mereka laporkan ((Arrow, 1963) dikutip dalam (Widodo, 2019)).

Dalam konteks metodologi pendataan, ketidakjujuran pelaporan mandiri ini menegaskan kritik fundamental terhadap metode *selfreporting* atau deklarasi mandiri. Metode ini terbukti memiliki kelemahan validitas internal yang tinggi ketika diterapkan pada masyarakat dengan karakteristik *opportunistic* tanpa disertai mekanisme kontrol eksternal. Sebagaimana ditekankan dalam laporan global, data yang hanya bersandar

pada klaim sepihak tanpa verifikasi lapangan yang ketat rentan terhadap bias pelaporan yang ekstrem (World Bank, 2021).

Implikasi kebijakan dari temuan ini sangat krusial. Kebijakan bantuan sosial yang bertransformasi ke arah digital namun hanya mengandalkan data deklaratif (administrasi di atas kertas) tanpa disertai audit fisik (*groundchecking*), berisiko tinggi mengalami kegagalan sasaran. Hal ini tidak hanya menyuburkan ketidakadilan sosial, tetapi juga secara ineffisien mengalihkan sumber daya publik yang terbatas dari kelompok yang benarbenar membutuhkan (*the poorest of the poor*) kepada kelompok yang oportunistis (*free riders*). Oleh karena itu, verifikasi *doortodoor* terbukti bukan langkah mundur, melainkan instrumen korektif mutlak untuk mengatasi kegagalan pasar informasi tersebut.

Perilaku memanipulasi data visual hunian demi mendapatkan bantuan sosial pada hakikatnya merupakan bentuk penyebaran informasi palsu di ranah administrasi publik. Fenomena ini menegaskan bahwa selain verifikasi fisik, diperlukan upaya edukasi untuk membangun kesadaran digital masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Irham Akbar & Rezza Fahlevvi, 2023), pencegahan penyebaran misinformasi memerlukan pemanfaatan peralatan dan fitur literasi digital yang tepat. Dalam konteks ini, literasi digital masyarakat desa perlu ditingkatkan agar mereka memahami implikasi etis dan hukum dari data yang mereka unggah ke dalam sistem aplikasi pemerintah.

#### 4. Budaya Kemiskinan dan Perangkap Ketergantungan

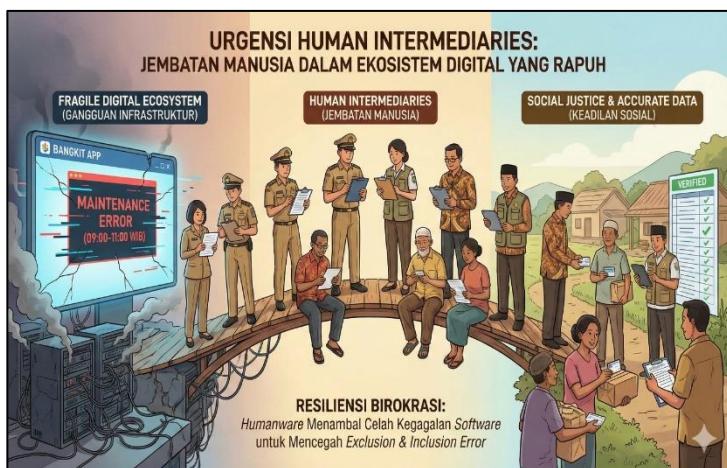
Hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya pendidikan dan dominasi bahasa daerah pada kepala keluarga miskin memperlihatkan adanya hambatan struktural dalam mobilitas sosial. Namun, aspek yang lebih krusial untuk dibahas adalah mentalitas ketergantungan yang terobservasi. Sebagaimana dikemukakan dalam teori Budaya Kemiskinan (*Culture of Poverty*) yang dirujuk dari (Arifin, 2020), kemiskinan bukan hanya soal ketiadaan materi, tetapi juga pola adaptasi, nilai, dan reaksi masyarakat terhadap posisi marginal mereka yang kemudian menjadi siklus yang diturunkan. Dalam kasus Kecamatan Talaga, temuan bahwa sebagian masyarakat terus berharap pada bantuan pemerintah setiap bulan dan menunjukkan kecenderungan enggan mencari solusi mandiri mengonfirmasi adanya siklus ketergantungan yang melemahkan etos kerja dan agensi personal (Arifin, 2020).

Program bantuan yang bersifat karitatif dan berjangka panjang tanpa disertai komponen pemberdayaan yang transformatif, dalam perspektif teori ini, justru berisiko melanggengkan *culture of poverty* karena masyarakat kehilangan motivasi internal dan kapasitas untuk keluar dari garis kemiskinan secara mandiri ((Lewis, 1966) Lewis, 1966, sebagaimana didiskusikan dalam (Arifin, 2020)). Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dirancang dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (*giving fish*), tetapi juga berorientasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan agar tidak berulang lintas generasi.

Upaya ini harus diwujudkan melalui kebijakan afirmatif berupa pemberian pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja yang produktif, sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri (*teaching how to fish*). Salah satu instrumen pemberdayaan yang efektif adalah optimalisasi peran kelembagaan ekonomi desa, sebagaimana temuan (Mulianingsih, 2022) yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam unit usaha desa (BUMDes) mampu meningkatkan keberdayaan ekonomi dan memutus ketergantungan pada bantuan sosial.

## 5. Urgensi Human Intermediaries dalam Ekosistem Digital yang Rapuh

Gangguan teknis pada aplikasi BANGKIT mencerminkan tantangan infrastruktur yang lebih luas dalam penerapan *egovernment* di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan (Dimas & Fahlevvi, 2024) di Kabupaten Sumbawa, yang menegaskan bahwa pengentasan kesenjangan digital di daerah menuntut adanya strategi adaptif dan dukungan infrastruktur yang memadai agar pelayanan publik tidak terhenti total saat sistem digital mengalami kendala.



**Gambar 4. Urgensi Human Intermediaries**

Kendala teknis berupa pemeliharaan (*maintenance*) aplikasi BANGKIT pada jam operasional mengungkapkan kerapuhan infrastruktur digital di tingkat lokal. Dalam situasi di mana sistem gagal berfungsi secara otonom, penelitian ini menyoroti peran krusial dari sumber daya manusia yakni Praja IPDN yang berkolaborasi dengan perangkat desa sebagai aktor sentral dalam menjaga keberlangsungan validasi data. Dalam literatur Sistem Informasi, peran ini dikonseptualisasikan sebagai *Human Intermediaries* atau perantara manusia seperti visualisasi pada gambar 4.

Praja IPDN dan perangkat desa tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data pasif, melainkan bertindak sebagai "jembatan manusia" yang menghubungkan realitas kemiskinan warga dengan sistem birokrasi digital yang sedang mengalami disrupsi teknis. Ketika infrastruktur server tidak stabil, para *intermediaries* ini melakukan fungsi

mitigasi dengan menerjemahkan data fisik lapangan ke dalam format manual sementara, sebelum mengintegrasikannya kembali ke sistem digital (*reentry*) saat stabilitas pulih. Keberadaan *Human Intermediaries* ini menjadi instrumen penentu keadilan sosial. Tanpa intervensi mereka sebagai jembatan, kegagalan infrastruktur digital berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural berupa *Exclusion Error* (warga miskin tidak terdata karena sistem *down* saat pendataan) atau membiarkan *Inclusion error* (warga kaya tetap menerima bantuan karena data lama tidak terverifikasi).

Oleh karena itu, strategi validasi hibrida ini membuktikan bahwa dalam konteks *digital divide*, teknologi bukanlah solusi tunggal. Justru, resiliensi birokrasi—kemampuan birokrat jalanan (*streetlevel bureaucrats*) untuk beradaptasi menambal celah kegagalan teknologi—adalah faktor utama yang menjamin akurasi data. Hal ini menegaskan bahwa elemen manusia (*humanware*) tetap menjadi variabel independen yang menentukan keberhasilan inovasi tata kelola pemerintahan, melampaui kapasitas perangkat lunak (*software*) itu sendiri.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan digitalisasi administrasi pemerintahan di tingkat daerah tidak sekadar terletak pada stabilitas infrastruktur teknis, tetapi juga pada kompleksitas perilaku sosial masyarakat. Temuan empiris di Kecamatan Talaga menunjukkan bahwa gangguan sistem aplikasi BANGKIT dan tingginya angka manipulasi data (*moral hazard*) oleh warga tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan server semata. Penurunan data valid dari 2.127 KK menjadi 2.048 KK, serta penemuan 468 KK *Inclusion error* dan identifikasi warga miskin baru (*Exclusion Error*), membuktikan bahwa intervensi manusia memiliki peran tak tergantikan dalam menjamin akurasi data kemiskinan.

Implikasi kebijakan utama dari studi ini menuntut perubahan paradigma tata kelola pemerintahan dari pendekatan *DigitalFirst* atau *DigitalOnly* menjadi pendekatan *Hybrid by Design*. Pemerintah daerah dan pengembang kebijakan harus merancang ekosistem e-government yang sejak awal mengintegrasikan elemen teknologi dan verifikasi manusia sebagai satu kesatuan sistem. Sebagaimana disarankan oleh (Kawuryan dkk., 2025) dalam peta jalan keberlanjutan sosial, tata kelola pemerintahan (governance) harus menyeimbangkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan (Ginting & Nawawi, 2022) yang menekankan bahwa optimalisasi strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal memerlukan sinergi kuat antara regulasi pemerintah daerah dan pemahaman masyarakat, agar program tidak berjalan parsial.

Dalam kerangka *Hybrid by Design* ini, validasi fisik secara *doortodoor* tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai langkah darurat (*contingency plan*) atau solusi adhoc saat server mengalami gangguan. Sebaliknya, verifikasi faktual harus dilembagakan sebagai Prosedur Operasional Standar (SOP) yang wajib dan melekat pada setiap siklus

pemutakhiran data digital. Peran birokrasi jalanan (*streetlevel bureaucrats*) dan aparat desa sebagai *human intermediaries* perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas, agar dapat berfungsi sebagai auditor lapangan dalam memverifikasi klaim digital masyarakat secara langsung

Dengan demikian, transformasi digital tidak boleh menghilangkan peran verifikasi fisik. Sinergi antara kecepatan algoritma digital dan ketelitian verifikasi manual adalah kunci untuk memitigasi risiko ketidakadilan distributif, meminimalisir perilaku oportunistik warga, dan memastikan bantuan sosial benarbenar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel Jurnal**

- Arifin, S. (2020). Kemiskinan Struktural dan Budaya Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 45–60.
- Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. *The American Economic Review*, 53(5), 941–973.
- Dimas, M., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), 194–215. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4504>
- Egyedi, T. M., & Spirco, J. (2011). Standards and compatibility in IT-enabled change: The case of the Dutch railway sector. *Technology in Society*, 33(1–2), 36–46. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2011.03.001>
- Ginting, A. H., & Nawawi, S. (2022). OPTIMALISASI BUMDes SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENEKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN POHuwato. *Jurnal Registratie*, 4(2), 64–76. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2817>
- Heeks, R. (2001). Information systems and development: Theoretical perspectives. *Information Systems Journal*, 11(1), 3–24. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2575.2001.00093.x>
- Ilham, R., Ardieansyah, A., Fahlevvi, M. R., Zahranti, W., Satria, L., Rotzami, R., & Tawil, Z. N. (2025). *Teknologi Keuangan Digital dan Inklusi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Daerah: Bukti dari Sumatera Barat*. 657, 04004.
- Irham Akbar, M., & Rezza Fahlevvi, M. (2023). Cegah Penyebaran Misinformasi di Media Sosial Menggunakan Peralatan dan Fitur Literasi Digital. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.61124/1.renata.2>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. *Government Information Quarterly*, 33(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.001>

- Kawuryan, M. W., Fahlevvi, M. R., Putri, T. S., Bingamawa, M. T., Apriyansa, A., Siregar, E., Rahman, M. F., Redza, A., Tawil, Z. N., & Persulessy, M. (2025). Green Technology and Governance in Sustainable Tourism: A Roadmap for Human and Social Sustainability in Cirebon, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 657, 02001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202565702001>
- Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American*, 215(4), 19–25.
- Mandala, D. R. T. L., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 147–173.
- Misuraca, G., & Viscusi, G. (2015). Shaping public sector innovation theory: An interpretative framework for ICT-enabled governance innovation. *Electronic Commerce Research*, 15(3), 303–322. <https://doi.org/10.1007/s10660-015-9185-4>
- Mulianingsih, S. (2022). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN DESA. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10–21. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2405>
- Purwanto, E. A., Sulistyastuti, D. R., & Khoirunurrofik, K. (2021). Digital governance challenges in local government: A case study of social assistance distribution in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 44–62. <https://doi.org/10.22146/jsp.59687>
- Sinurat, R. P. P. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Wirtz, B. W., Weyrer, J. C., & Schichtel, F. T. (2019). An integrative public IoT framework for smart government. *Government Information Quarterly*, 36(2), 333–345. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.004>
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-0>

## Buku

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. (2023). *Laporan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) Tahun 2023*.
- Pemerintah Kabupaten Majalengka. (2023). *Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BANGKIT*

*(Bebas Kemiskinan dan Stunting).*

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2022). *Buku Saku Pemutakhiran Data Berbasis Partisipatif*.

Widodo, T. (2019). *Ekonomi Publik: Teori dan Aplikasi*. BPFE-Yogyakarta.

World Bank. (2022). *Bridging the Digital Divide: Infrastructure Challenges in Rural Indonesia*. The World Bank Group.